

STUDI KRITIS TERHADAP KURIKULUM MI/SD 2013

HENDRI PURBO WASESO
Email: hendripw@unsiq.ac.id

Prodi Pendidikan Guru MI
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Abstract

This paper attempts to criticize the MI/SD 2013 curriculum by using critical education theories (Paulo Freire, Michael Apple and Henry Giroux). The critical study starts from the construction process to the content contained in it. The results of this study indicate that the first, the birth of the 2013 curriculum motivated by global economic conditions where high-quality and highly competitive workforce become the main demand. Negative phenomenon that emerged in the community also became the background of the birth of the curriculum 2013. The imposition of the implementation of curriculum 2013 dominant because of political factors. Second, the construction of MI/SD 2013 curriculum can be explained through four things: the compaction of subjects in the curriculum structure of MI / SD, core competencies in the curriculum of 2013 have better character strengthening when compared with competency standards in SBC, scientific approach and integrative thematic learning for MI / SD children is designed so that learning can encourage children to master scientific skills and authentic assessment is used as an effort to measure the process and learning outcomes comprehensively. The construction of MI / SD 2013 curriculum seen from the perspective of critical education results in several conclusions: first, the objective of MI / SD 2013 curriculum leads to production relation where learners are designed to be ready and able to fill the roles that have been provided in the formation of capitalist society. In addition to research-based teacher education, the maximization of religious teaching content contained in the MI curriculum can be functioned as a language of possibility. Second, the concept contained in the MI / SD 2013 curriculum that requires learners to think high level and qualified educators precisely indicates a separation between theory and practice. This condition does not apply to urban schools. Third, MI / SD 2013 curriculum is only for children who have better capital economically, socially, and intellectually.

Keywords: *Curriculum MI/SD 2013 and Critical Pedagogy*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu aspek mendasar dalam usaha mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi proses dan dinamika kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pluralitas (Zainuddin, 2008:1). Pendidikan memiliki posisi yang

signifikan dalam membentuk masyarakat yang sadar akan perubahan sosial. Pendidikan dalam arti ini merupakan media penting untuk mempersiapkan masyarakat yang peka terhadap perubahan sosial. Jika melihat realitas yang ada, ternyata kondisi pendidikan Indonesia mengalami berbagai problematika baik pada tataran praksis maupun konseptual atau pemikiran. Pada tataran praksis, Agus Salim memahami pendidikan saat ini hanya menghasilkan kepatuhan, kepatutan dan ketaatan pada otoritas negara. Kepatuhan pada guru, kolektivisme kepatuhan pada norma sekolah yang pada tingkat mikro menjelma menjadi pemaksaan individu secara sistematis melahirkan pribadi-pribadi pengekor (Salim, 2007:14). Lebih lanjut Agus Salim (2007:15) melihat bahwa praktik pendidikan mengajarkan anak untuk takut berbuat keliru, kekeliruan dipandang sebagai 'aib' sehingga harus dihindari. Sedangkan problematika konseptual atau pemikiran dapat dilihat dari produk-produk yang dihasilkan terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan seperti misalnya dalam bentuk undang-undang atau kurikulum nasional. Problemnya adalah sejauh mana gagasan-gagasan konseptual yang dirumuskan tersebut menjadi berguna dan sejalan dengan upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Pertanyaan tersebut juga berlaku pada kurikulum 2013 sebagai salah satu produk pemikiran yang akan serentak diberlakukan pada tahun ajaran 2014/2015 lalu.

Dalam prosesnya, kurikulum 2013 mendapat berbagai kritikan. Seperti menurut Ketua Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Itje Chodijah yang menganggap bahwa proses penyusunan desain kurikulum 2013 dinilai tidak transparan. Selain itu, proses uji publik juga dinilai asal-asalan serta minim sosialisasi (kompas.com, 2/01/2014). Jika hal tersebut sesuai dengan fakta yang ada, maka perubahan kurikulum 2013 masuk dalam wacana politik pendidikan dimana kepentingan kelompok dominan selalu menang atau paling tidak ada kelompok minoritas yang tidak diperhatikan dalam perubahan kurikulum tersebut. Kritik tersebut dapat menjadi titik tolak untuk mengkaji secara substansi yang dibawa oleh kurikulum 2013.

Dalam tulisan ini, persoalan kurikulum 2013 tersebut dilihat dari perspektif pendidikan kritis. Sedangkan pendidikan kritis dengan Freire

sebagai pelopor utamanya memiliki asumsi bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah memberdayakan kaum tertindas agar memiliki kesadaran untuk bertindak melalui praksis emansipatoris (Suharto, 2012:275). Asumsi asumsi yang dibangun pendidikan kritis selanjutnya digunakan peneliti untuk melihat seberapa jauh kurikulum 2013 memiliki muatan-muatan pendidikan kritis atau bahkan bertentangan dengannya. Tentunya dengan melihat lebih lanjut komponen-komponen kurikulum yang ada dalam kurikulum 2013 dan konsep-konsep kunci yang ada didalamnya.

Kurikulum 2013 dilihat dari prespektif pendidikan kritis cukup signifikan dalam meneropong kondisi pendidikan bangsa masadepan. Artinya seberapa jauh pemerintah mampu melakukan upaya pencerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Di sinilah letak perlunya mengadopsi dan menginkorporasikan asumsi-asumsi pendidikan kritis dalam kurikulum. Untuk kepentingan fokus penelitian, kurikulum MI/SD yang terdapat dalam kurikulum 2013 akan digali lebih dalam. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana latar belakang lahirnya kurikulum MI/SD 2013?, bagaimana konstruksi kurikulum MI/SD 2013?, dan bagaimana konstruksi kurikulum MI/SD 2013 dilihat dari perspektif pendidikan kritis?

B. HASIL PENELITIAN

Materi kajian dalam tulisan ini adalah kurikulum 2013 untuk MI/SD. Dengan menggunakan metode *library research*, penulis menelaah berbagai produk perundang-undangan yang berbicara tentang kurikulum 2013. Perundang-undangan tersebut adalah Bahan Uji Publik Kurikulum 2013, Permendikbud No. 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI, Permendikbud No. 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 dan Permenag No. 000912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013. Buku-buku teknis kurikulum yang diterbitkan oleh Kemendikbud juga termasuk dalam data primer seperti Panduan Teknis Penilaian di SD, Panduan Teknis Pembelajaran Tematik Terpadu Dengan Pendekatan Saintifik di Sekolah Dasar, Kurikulum 2013: Kompetensi Dasar SD/MI, Permendikbud No. 64 Tahun 2013 Tentang

Standar Isi, Permendikbud No. 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian, Permendikbud No. 68 Tahun 2013, Permendikbud No. 69 Tahun 2013, UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 dan PP No 32/2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik *deskriptif analitik*. Sedangkan untuk melakukan interpretasi atas data-data penelitian dalam analisisnya digunakan pola penalaran abduktif atau reflektif. Dalam proses mengkritisi kurikulum MI/SD 2013, penulis menggunakan teori-teori pendidikan kritis baik yang digagas oleh Freire, Apple maupun Henry Giroux.

1. Tinjauan Kritis Kurikulum 2013

Sebagai sebuah produk kebijakan, kurikulum 2013 tidak bisa terlepas dari realitas sosial politik yang melatarinya. Kurikulum 2013 sendiri dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh para pembuat kebijakan sehingga dirasa perlu untuk memberlakukan kurikulum 2013. Untuk mengetahui kecenderungan kurikulum 2013, hendak dideskripsikan terlebih dahulu konten-konten utama apa yang terdapat didalamnya dan bagaimana proses konstruksi kurikulum 2013 itu berjalan sampai kemudian diberlakukan secara resmi oleh pemerintah.

Konten-konten utama dalam kurikulum 2013 yang dimaksud adalah ide-ide baru atau istilah baru yang digunakan dalam menjelaskan substansi yang ada dalam kurikulum 2013. Ide-ide tersebut dibatasi hanya sisi perubahan yang dilakukan dengan melihat perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum satuan tingkat pendidikan (KTSP). Dalam upaya perumusan kurikulum 2013, perubahan dan pengembangan kurikulum dilakukan dengan menata empat elemen standar nasional yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar penilaian (Mulyasa, 2013:60). Isi perubahan keempat standar tersebut dituangkan dalam kurikulum dengan menggunakan istilah-istilah yang relatif baru seperti kompetensi inti, pendekatan saintifik, dan penilaian autentik.

Tiga konten utama dalam kurikulum 2013 yaitu kompetensi inti, pendekatan saintifik dan penilaian autentik merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membenahi konten kurikulum yang ada didalam KTSP. Secara konseptual, kurikulum 2013 memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan KTSP. Keunggulan tersebut dapat dilihat dari kompetensi inti (sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan) sebagai pengikat seluruh kompetensi dasar yang ada dalam setiap mata pelajaran. Sehingga semua mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum terpusat pada pemenuhan sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan.

Perubahan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013 merupakan perintah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang salah satu poinnya harus ada penataan kurikulum (Junizar, 2014). Atas dasar ini, Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merasa perlu untuk merumuskan suatu kurikulum baru yang nantinya disebut sebagai kurikulum 2013. Jika dilihat proses konstruksi kurikulum sebagai salah satu kebijakan publik, kurikulum 2013 melewati tiga tahap. *Pertama*, proses akumulasi aspirasi. Akumulasi aspirasi dalam kurikulum 2013 dimulai dari dilakukannya uji publik selama tiga pekan. Dalam prosesnya, kurikulum 2013 mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat seperti masyarakat umum (dialog virtual), dialog tatap muka diberbagai kota dan daerah se Indonesia, maupun dari lembaga dan organisasi yang berkaitan dengan pendidikan. Uji publik kurikulum 2013 sebagai bentuk proses akumulasi aspirasi cukup terlihat. Akumulasi aspirasi tersebut misalnya kekhawatiran tentang kemampuan guru dalam implementasi, implementasi kurikulum 2013 terlalu terburu-buru, dan kajian evaluasi kurikulum KTSP yang tidak melalui riset.

Kedua, proses artikulasi. Proses artikulasi dalam perumusan kurikulum 2013 dapat dilihat dari jawaban-jawaban Kemendikbud yaitu keresahan kualitas guru yang masih rendah dijawab dengan diagendakannya pelatihan kurikulum 2013 untuk guru. Sedangkan pada kenyataannya, terdapat banyak masalah teknis yang menjadikan pelatihan tersebut tidak maksimal. *Ketiga*,

proses akomodasi. Dalam proses ketiga ini, tidak semua tuntutan bisa diakomodasi. Bahkan jika dilihat dari dokumen bahan uji publik kurikulum 2013 dibandingkan dengan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah melalui Permendikbud No. 81a tentang implementasi kurikulum tidak ada perubahan esensial.

Melihat tahap-tahap proses perumusan kurikulum 2013 yang terjadi, pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam perumusan kurikulum 2013 menganut teori advokasi yang mendasarkan pada argumentasi yang rasional, logis, dan bernilai. Dalam teori ini, pemerintah pusat sangat perlu menyusun kurikulum 2013 yang bersifat nasional demi kepentingan umum. Kurikulum 2013 diterapkan bukan berdasarkan pada kondisi yang mendesak, namun kurikulum 2013 dianggap sebagai ‘menu terbaik’ yang seharusnya dapat dinikmati oleh generasi masa depan bangsa. Muhammad Nuh menyatakan bahwa “jika kurikulum 2013 ini tidak segera diterapkan, berapa juta anak yang akan merugi karena tidak dapat menikmati manfaat dari kurikulum 2013 ini” (Najwa, 2013).

Terdapat tiga kritik terhadap kurikulum 2013. *Pertama*, dominasi Faktor politik dalam perubahan kurikulum 2013. Pendidikan dimaknai sebagai suatu aktifitas yang tidak pernah terlepas dari muatan politik (Nuryatno, 2011:1). Kelly menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan yang kontroversi biasanya bersifat politis, karena sistem pendidikan dapat dimanipulasi oleh kepentingan politik dalam rangka mencapai tujuannya (Kelly, 2004:38). Melihat proses perjalanan dalam perumusan kurikulum 2013 yang hanya selesai dalam waktu enam bulan jika dikaitkan dengan kondisi politik pada waktu itu, diterapkannya kurikulum 2013 pada bulan Juli 2013 adalah dominan karena faktor politik. Terdapat dua argumentasi utama mengapa kurikulum 2013 harus secepat mungkin diterapkan,

- a. Bahasa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 tentang penataan kurikulum digunakan oleh Kemendikbud untuk melegitimasi perlunya perubahan kurikulum. Kenyataannya, kurikulum tidak hanya dilakukan penataan, melainkan

berubah secara mendasar yaitu pada standar kompetensi lulusan, isi, proses dan penilaian.

- b. Tahun 2014 sebagai tahun politik mengharuskan kurikulum 2013 diterapkan pada Juli 2013. Pemaksaan implementasi kurikulum 2013 pada Juli 2013 merupakan salah satu efek dari kondisi perpolitikan nasional dimana pada tahun 2014 hendak dilaksanakan pemilihan presiden. Secara otomatis, kurikulum 2013 harus selesai dibahas dalam waktu yang singkat walaupun harus menghadapi banyak kendala-kendala di lapangan.

Selain faktor politik, munculnya kurikulum 2013 dilatarbelakangi oleh fenomena negatif yang mengemuka di masyarakat. Dalam draft uji publik disebutkan bahwa alasan pengembangan kurikulum selain tantangan ekonomi global adalah fenomena negatif yang mengemuka seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian dan gejolak masyarakat. Artinya, pemerintah berupaya merespon fenomena-fenomena negatif tersebut melalui konten-konten utama dalam kurikulum 2013 terutama pada rumusan kompetensi inti yang secara proporsional menempatkan aspek spiritual dan sosial sebagai media untuk menguatkan karakter peserta didik. Bahkan setiap mata pelajaran diwajibkan memuat aspek spiritual dan sosial dimana secara integral disampaikan kepada peserta didik bersamaan dengan aspek pengetahuan dan ketrampilan. Walaupun demikian, beberapa mata pelajaran seperti mata pelajaran matematika terkesan dipaksakan karena konten materi tidak koheren dengan aspek spiritual.

Kedua, kritik ideologi dalam kurikulum 2013. Jika dilihat dari hirarki perundang-undangan, kurikulum 2013 bagian dari amanat dari PP No. 32 Tahun 2013 perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dan PP No. 32 Tahun 2013 adalah turunan dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Adapun UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sedikit banyak menganut ideologi liberalisme yang mengedepankan persoalan optimalisasi kualitas individu yang sanggup bersaing dan bertanggungjawab dalam iklim kapitalisme (Achmadi, 2010:4-5). Artinya, kurikulum 2013 dirumuskan untuk semakin mengafirmasi ideologi liberalisme yang dianut dengan

memposisikan peserta didik agar mampu berperan dalam formasi sosial kapitalis.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki legitimasi kekuasaan berperan penuh dalam suksesi pendidikan sebagai apparatus Negara ideologis. Louis Althusser menjelaskan bahwa apparatus Negara yang ditempatkan sebagai apparatus nomor satu dalam formasi sosial kapitalis yakni sebagai apparatus Negara ideologis yang dominan adalah apparatus pendidikan (Althusser, 2008:28-31). Pendidikan dalam hal ini melalui kurikulum 2013 sebagai instrument vital pendidikan sangat mungkin untuk disisipi ideologi yang diselewengkan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dan tujuan penguasa. Inilah yang menurut Haryatmoko disebut dengan istilah disimulasi yaitu sebagai sifat negatif ideologi yang mencolok terutama bila terkait dengan peran kekuasaan. Kekuasaan akan selalu mencari legitimasi dan dalam hubungan kekuasaan akan mendapat pembenaran ideologi pula (Haryatmoko, 2003:16-20). Peserta didik sebagai sasaran dari diimplementasikannya kurikulum 2013 merupakan objek dari ideologi penguasa yang bersifat teori dimana peserta didik dipaksa secara halus hanya karena faktor politik. Sedangkan teori yang dijadikan ideologi adalah pengetahuan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi agar penguasa dapat menyesuaikan diri dengan formasi sosial masyarakat ekonomi kapitalis.

Ketiga, kepentingan ekonomi sebagai basis kurikulum 2013. Sekolah sebagai sasaran utama implementasi kurikulum 2013 sangat efektif dalam penanaman ideologi-ideologi penguasa. Kurikulum 2013 mampu mengarahkan institusi pendidikan sekaligus perilaku peserta didiknya agar sesuai dengan tuntutan-tuntutan ekonomi global. Pemerintah memiliki andil besar dalam proses penyesuaian satuan pendidikan dengan kondisi ekonomi global yaitu melalui kekuasaan yang dimilikinya. Tuntutan ekonomi global sebagai acuan utama dalam pengembangan kurikulum 2013 dinyatakan dalam dokumen kurikulum 2013 (Permendikbud No. 67 Tahun 2013) sebagai berikut:

....Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di *World Trade Organization*

(WTO), *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) Community, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknoains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan....

Dalam draft uji publik kurikulum 2013 juga disebutkan beberapa rasionalisasi diperlukannya perubahan kurikulum yang menunjukkan kecenderungan kepentingan ekonomi sebagai basis dari kurikulum 2013. Salah satu rasionalisasi tersebut adalah perlunya ekonomi berbasis pengetahuan. Ekonomi berbasis pengetahuan dalam kurikulum 2013 juga terlihat pada tujuan kurikulum 2013 yang memusatkan kompetensi peserta didik pada perilaku produktif, kreatif, dan inovatif. Hal tersebut diberlakukan dikarenakan kondisi ekonomi global yang mengarah pada masyarakat industri dan perdagangan modern sehingga tidak ada cara lain kecuali mempersiapkan peserta didik untuk selalu siap bersaing dan berkompetisi dalam dunia kerja. Sedangkan logika kompetisi adalah paradigma yang dipakai oleh neoliberal yang pada akhirnya hanya akan menghasilkan pemenang dan pecundang. Agus Nuryatno menyatakan bahwa kompetisi dalam pendidikan tidaklah fair jika anak yang sudah kuat dan mapan secara ekonomi dan modal dipersaingan dengan anak yang lebih lemah. Selanjutnya Agus Nuryatno mengistilahkan kondisi ini dengan kompetisi yang tidak sehat, bahkan malah eksploitasi dan kontraproduktif (Nuryatno, 2011:70). Eksploitasi tersebut terjadi karena ada diskriminasi terhadap anak yang memiliki berbagai keterbatasan intelektual, sedangkan kurikulum 2013 mensyaratkan kondisi anak yang siap dan memiliki *high thinker*.

2. Kurikulum MI/SD 2013 dalam Perspektif Pendidikan Kritis

Kurikulum MI/SD 2013 dideskripsikan dalam dua bentuk analisis. *Pertama*, kurikulum MI/SD 2013 dijelaskan berdasarkan komponen-komponen yang merujuk pada berbagai perundang-undangan yaitu Permendikbud No. 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi, Permendikbud No. 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD, Permendikbud No. 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 dan Permenag No. 000912 Tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013.

Komponen-komponen kurikulum MI/SD 2013 meliputi tujuan, isi, strategi pelaksanaan, dan evaluasi.

Tujuan kurikulum MI/SD 2013 mengacu pada tujuan kurikulum 2013. Dalam permendikbud No. 67 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum MI/SD disebutkan bahwa kurikulum MI/SD bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Jika dilihat tujuan kurikulum 2013 untuk SMP/MTs dalam Permendikbud No. 68 Tahun 2013 dan SMA/MA dalam Permendikbud No. 69 Tahun 2013 tidak ada perbedaan redaksi sedikitpun. Dalam redaksi yang digunakan dalam tujuan kurikulum 2013 memiliki titik tekan yang berakar pada ideologi liberasisime. Asumsi yang digunakan adalah pendidikan merupakan aktifitas peserta didik yang mendorong tumbuhnya kreativitas, semangat inovatif, dan optimalisasi kualitas individu yang sanggup bersaing dan bertanggungjawab dalam iklim kapitalisme. Itulah sebabnya pendidikan lebih diarahkan untuk mengejar kualitas (akademis ataupun professional) walaupun dengan resiko biaya tinggi (Achmadi, 2010:5).

Isi kurikulum bukan sekedar berkenaan dengan pengalaman belajar siswa, namun pengetahuan ilmiah yang harus diberikan kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan (Sudjana, 1996:27). Kompetensi inti untuk setiap tingkat kompetensi tersebut dirinci kemudian ke dalam kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang terdapat pada struktur kurikulum MI/SD. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik.

Dalam struktur kurikulum SD dan struktur kurikulum MI, perbedaan antara SD dan MI terletak pada muatan pendidikan agama Islam dimana MI memberi porsi lebih banyak yaitu dipecah menjadi empat mata pelajaran (Al-

Qur'an Hadist, Fikih, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam). Sedangkan Bahasa Arab menjadi mata pelajaran tersendiri dalam struktur kurikulum MI. Selebihnya, tidak ada perbedaan yang substansial antara struktur kurikulum SD dan MI.

Adapun muatan materi Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum MI 2013 dipersiapkan oleh Kementerian Agama melalui Permenag No 000912 Tahun 2013 sebagai pengganti dari Permenag No. 02 Tahun 2008. Jika dibandingkan tujuan dan ruang lingkup kelompok mata pelajaran PAI di MI yang ada didalam Permenag No 000912 Tahun 2013 dan Permenag No. 02 Tahun 2008 tidak ada perbedaan sedikitpun. Perbedaan yang terjadi kemudian adalah pada rumusan kompetensi dasar setiap mata pelajaran PAI di MI yang harus mengacu pada kompetensi inti dimana kompetensi dasar diklasifikasikan menjadi empat aspek kompetensi (sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan). Artinya, Materi PAI MI dalam kurikulum MI 2013 diperluas atau bahkan dipersempit sehingga terjadi perimbangan antar aspek kompetensi. Hal tersebut adalah implikasi dari penggunaan kompetensi inti untuk semua mata pelajaran dalam kurikulum 2013.

Selanjutnya, untuk mata pelajaran umum, struktur kurikulum MI/SD 2013 memposisikan IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran, bukan sebagai mata pelajaran tersendiri. Argumentasi yang diberikan oleh Kemendikbud adalah penggabungan IPA dan IPS dalam semua materi pelajaran dapat dijadikan sumber kompetensi untuk membentuk sikap ilmuwan dan kepedulian dalam berinteraksi sosial dan dengan alam secara bertanggung jawab. Dampak dari penggabungan ini mengharuskan guru MI/SD yang memiliki kemampuan tinggi dalam memahami indikator-indikator IPA dan IPS yang digabungkan dengan mata pelajaran lain. Selain itu, menurut Prof. Yohanes Surya pengintegrasian IPA ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat menghilangkan esensi dari indikator IPA itu sendiri sehingga pengintegrasian itu sungguh tidak mungkin. Lebih lanjut, Prof. Yohanes Surya mengaku sudah mencoba mempraktikkan pengintegrasian tersebut dengan timnya dan hasilnya sangat tidak memungkinkan (Najwa, 2013). Sampai disini, integrasi IPA dan IPS ke

dalam mata pelajaran tertentu menjadi kontraversi dalam kurikulum MI/SD 2013.

Strategi pelaksanaan kurikulum berkaitan dengan cara dalam menyampaikan isi kurikulum kepada siswa agar tujuan kurikulum dapat tercapai. Nana Syaodih Sukmadinata menyebutkan strategi pelaksanaan ini sebagai metode dan strategi pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik bahan ajar atau isi kurikulum (Sukmadinata, 2008:107). Adapun strategi pelaksanaan yang digunakan dalam kurikulum MI/SD 2013 adalah pembelajaran tematik terpadu dan pendekatan saintifik. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pendekatan saintifik untuk anak MI/SD didesain agar pembelajaran dapat mendorong anak untuk melakukan ketrampilan-ketrampilan ilmiah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2013:8). Ketrampilan-ketrampilan ilmiah tersebut diperoleh melalui berbagai model pembelajaran. Model pembelajaran yang disebutkan dalam buku panduan teknik pembelajaran di SD yang diterbitkan oleh Kemendikbud disebutkan tiga model pembelajaran yaitu *Project based learning*, *problem based learning*, dan *discovery learning*. Ketiga model pembelajaran tersebut merupakan model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk aktif baik secara pengetahuan, sikap, maupun psikomotorik. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana nasib anak-anak MI/SD yang memiliki keterbatasan intelektual dimana model-model pembelajaran seperti *Project Based Learning* sulit untuk diserap oleh mereka.

C. PEMBAHASAN

Penilaian hasil belajar siswa dalam kurikulum MI/SD 2013 dijelaskan dalam buku panduan teknis penilaian di SD yang menggunakan istilah penilaian autentik. Penilaian autentik mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Dalam penerapannya, penilaian autentik menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik yaitu kompetensi utuh yang merefleksikan

pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan pada mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik (Kemendikbud, 2013:5). Jika dibandingkan dengan KTSP, model penilaian autentik sebenarnya hanyalah istilah baru yang dikemas untuk menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan harus melihat keseimbangan antara aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan.

Kedua, kurikulum MI/SD 2013 dilihat dari perspektif pendidikan kritis. Dalam analisis ini, uraian mengenai kurikulum MI/SD 2013 dideskripsikan secara tematik berdasarkan pandangan dari pendidikan kritis yaitu kurikulum sebagai basis ekonomi, diskriminasi terhadap peserta didik dan guru sebagai alat kekuasaan.

a. Kurikulum sebagai basis ekonomi

Kegagalan lembaga pendidikan sebagai transformasi terciptanya humanisasi kehidupan publik ditandai dengan orientasi sekolah menjadi penyedia birokrat elit masyarakat dan pendukung kapitalisme modern melalui pasar kerja (Hidayat, 2011:180). Dalam hal ini kurikulum MI/SD 2013 dilihat sebagai sebuah seperangkat pengetahuan untuk memiliki berbagai kebutuhan pragmatis yang akhirnya terjebak pada logika komodifikasi. Salah satu rasionalisasi perlunya pengembangan kurikulum 2013 adalah tantangan masa depan yang berorientasi pada pengetahuan sebagai basis ekonomi. Implikasinya terlihat secara jelas dalam tujuan kurikulum 2013 dimana pilihan kata “produktif, kreatif, inovatif” menjadi mainstream yang hendak ditanamkan kepada peserta didik agar mereka mampu berperan secara maksimal dalam dunia kerja. Penerjemahan kata produktif, kreatif dan inovatif sebagai penekanan terhadap pembangunan ekonomi dapat dilacak lebih lanjut dalam prinsip penyusunan kurikulum 2013 yang disebutkan dalam Permendikbud No. 81a Tahun 2013, yaitu:

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja.

Secara otomatis, jika prinsip di atas dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum MI/SD, maka proses pembelajaran apapun yang diterapkan tetaplah berujung pada penyiapan peserta didik memasuki dunia kerja. Sedangkan dunia kerja yang ada sekarang masih dibawah kendali kapitalisme melalui paradigma “kompetisi” nya. Meskipun demikian, kurikulum MI/SD belum begitu terlihat bagaimana mekanisme ekonomi neoliberal ditransmisikan, dikarenakan satuan pendidikan MI/SD masih dominan pada bagaimana anak MI/SD memiliki pengetahuan dasar yang cukup. Sulitnya dalam memahami bagaimana mekanisme paham neoliberal masuk dalam kurikulum MI/SD 2013 akan sedikit berkurang ketika memposisikan kurikulum MI/SD 2013 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari asumsi-asumsi dasar yang dipakai kurikulum 2013 secara umum. Mengingat konstruksi kurikulum 2013 memang didesain sedemikian rupa untuk mengatur sekolah dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Adapun sebelumnya sudah disebutkan bahwa kurikulum 2013 merupakan produk yang dirumuskan berdasarkan kondisi ekonomi global sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang mengarahkan peserta didik pada dunia pasar kerja. Sampai disini, pemain utama neoliberal menyadari dengan sangat bahwa pendidikan adalah media utama untuk mentransformasikan ideologi-ideologinya melalui apa yang terdapat dalam sebuah kurikulum sekolah. *Hidden curriculum* dalam kurikulum MI/SD 2013 sebagai sesuatu yang tidak tertulis seperti norma, nilai, kepercayaan yang melekat serta ditransmisikan kepada murid berdasarkan aturan yang mendasari struktur rutinitas dan hubungan sosial di sekolah semakin terjelaskan.

b. Diskriminasi terhadap Peserta didik

Jika peserta didik dalam kurikulum MI/SD 2013 diposisikan berdasarkan kompetensi inti dan strategi pembelajarannya, maka terdapat beberapa kecenderungan yang mengarah pada keharusan peserta didik memiliki pra kondisi-pra kondisi tertentu. Keharusan ini adalah implikasi dari kekuatan hukum yang melekat pada kurikulum MI/SD 2013 melalui berbagai perundang-undangannya. Pra kondisi-pra kondisi tersebut yaitu *pertama*,

peserta didik harus berada pada lingkungan yang mendukung terhadap peningkatan *high tinker* nya. Pra kondisi ini adalah implikasi dari rumusan kompetensi inti untuk kelas akhir tingkat MI/SD dimana peserta didik diharapkan mampu menyajikan tidak hanya pengetahuan faktual saja, tetapi juga pengetahuan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis. Pemaksaan itu kemudian muncul ketika anak usia MI/SD diharapkan mampu berpikir kritis. Padahal untuk menyampaikan pengetahuan secara logis dan sistematis saja sudah cukup memberatkan ketika melihat kemampuan anak-anak MI/SD di daerah pedalaman yang serba kekurangan. Kritik ini sedikit terbantah ketika melihat model pembelajaran tematik integratif yang diterapkan dalam pembelajaran kelas I sampai kelas VI. Dikarenakan pembelajaran berdasarkan tema lebih meringankan dibandingkan dengan pembelajaran dengan model mata pelajaran terpisah.

Kedua, peserta didik harus memiliki motivasi belajar yang tinggi. Pra kondisi ini merupakan implikasi strategi pembelajaran yang berorientasi pada ketrampilan ilmiah. Teknik pembelajaran seperti *project based learning*, *problem based learning*, dan *discovery learning* yang diterapkan di kelas IV sampai VI juga menjadi konsekuensi logis dari keharusan peserta didik untuk selalu memiliki motivasi belajar yang tinggi. Tanpa motivasi belajar yang tinggi, proses pembelajaran dengan menggunakan teknik *project based learning*, *problem based learning*, dan *discovery learning* hanya akan berfungsi secara teori tidak sampai muncul dalam ranah praktik. Padahal pendidikan kritis memandang pemisahan antara teori dan praktik merupakan bagian dari aktivitas penindasan. Hal ini ditambah dengan rendahnya kualitas guru dalam menerapkan proses pembelajaran berbasis ilmiah.

c. Guru Sebagai Alat Kekuasaan

Kurikulum memiliki kontribusi dalam menciptakan reproduksi ketimpangan sosial dalam masyarakat kapitalis (Hidayat, 2011:107). Mekanisme terjadinya reproduksi ketimpangan sosial bermula dari kurikulum MI/SD 2013 yang diberlakukan secara nasional dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum MI/SD di setiap satuan pendidikan. Guru sebagai pelaksana kurikulum difungsikan untuk keberhasilan kurikulum yang

diberlakukan. Dibawah kendali dan kontrol pemerintah, peran guru dalam proses transformasi di kelas akan termarginalkan.

Jika asumsi bahwa kurikulum MI/SD 2013 dijadikan sebagai basis dari pembangunan ekonomi dan mengikuti trend pasar kerja global dibenarkan, maka posisi guru juga menjadi bagian dari objek kekerasan terselubung melalui standardisasi kurikulum di mana mekanisme kurikulum melalui pembelajaran di kelas telah dibuat sedemikian rupa dan terpusat. Pertanyaan yang kemudian menjadi persoalan krusial adalah mengapa pemerintah merubah kurikulum, bukannya membenahi kualitas guru yang masih rendah? Pertanyaan tersebut hendak mengantarkan pada afirmasi terhadap kekerasan terselubung dan menempatkan guru sebagai instrument atau alat dari kekuasaan Negara.

Kondisi guru saat ini dilihat dari hasil uji kompetensi yang dilakukan selama tiga tahun terakhir menunjukkan kualitas guru di Indonesia masih sangat rendah (antaranews.com, 12/01/2015). Rendahnya kualitas guru berimplikasi terhadap munculnya pesimisme implementasi kurikulum 2013 yang mengamanahkan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Pendekatan saintifik dan penilaian autentik ini hanya akan menjadi dokumen belaka ketika paradigma yang dibangun adalah guru mekanis-instrumental bukan guru transformatif. Guru diposisikan sebagai instrument kekuasaan Negara dimana tugasnya adalah mematuhi dan melayani kepentingan penguasa. Tekanan birokrasi pemerintah terhadap guru menggeser paradigma guru sebagai pendidik menjadi guru sebagai pekerja Negara. Pada akhirnya, guru hanya berfokus pada kelengkapan administratif yang diwajibkan pemerintah sebagai persyaratan memperoleh berbagai tunjangan sehingga inovasi dan peningkatan kualitas diri pada guru dalam mengelola pembelajaran yang efektif secara otomatis terabaikan.

Relasi-relasi kekuasaan dengan diberlakukannya kurikulum MI/SD 2013 dengan guru dan murid sebagai korbannya tidak sertamerta memposisikan pemerintah sebagai titik pusat dari suatu kondisi diskriminatif atau bahkan penindasan yang terjadi. Pendidikan kritis dengan *language of possibility*-nya masih tetap memiliki asumsi bahwa sekolah pinggiran, penindasan terhadap

guru, dan diskriminasi peserta didik sangat mungkin untuk diubah. Luasnya wilayah Indonesia dengan berbagai macam karakteristik dan kondisinya memang memerlukan perjuangan yang keras baik di level teori maupun praktik.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam tulisan ini adalah *pertama*, lahirnya kurikulum 2013 dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi global dimana tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing tinggi menjadi tuntutan utama. Fenomena negatif yang mengemuka di masyarakat juga menjadi latar belakang dari lahirnya kurikulum 2013. Adapun dipaksakannya implementasi kurikulum 2013 dominan karena faktor politik.

Kedua, konstruksi kurikulum MI/SD 2013 dilihat dari perspektif pendidikan kritis menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu tujuan kurikulum MI/SD 2013 mengarah pada relasi produksi di mana peserta didik didesain agar siap dan mampu mengisi peran-peran yang telah disediakan dalam formasi masyarakat kapitalis, konsep yang terdapat dalam kurikulum MI/SD 2013 yang mengharuskan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dan pendidik yang memiliki kualitas mumpuni justru mengindikasikan adanya pemisahan antara teori dan praktik, dan kurikulum MI/SD 2013 hanya diperuntukkan untuk anak yang memiliki modal lebih baik secara ekonomi, sosial, maupun intelektual.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, 2010. *Ideologi Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Althusser, Louis. 2008. *Tentang Ideologi; Marxisme strukturalis, Psikoanalisis. Cultural studies*. Jalasutra. Yogyakarta.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Hidayat, Rakhmat. 2011. *Pengantar Sosiologi Kurikulum*. Rajawali Press. Jakarta.

Kelly, A.V. 2004. *The Curriculum Theory and Practice*. Sage Publication. London.

Luki Junizar. Kurikulum 2013 (bagian 1), dalam www.tentangkurikulum2013.blogspot.com, diakses tanggal 15 September 2014

Mulyasa, E. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Rosdakarya. Bandung.

Nuryatno, M. Agus. 2013. *Mazhab Pendidikan Kritis*. Resist Book. Yogyakarta.

Panduan Teknis Pembelajaran Tematik Terpadu Dengan Pendekatan Saintifik di Sekolah Dasar. 2013. Kemendikbud. Jakarta.

Panduan Teknis Penilaian di Sekolah Dasar. 2013. Kemendikbud. Jakarta.

Permenag No. 000912 Tahun 2013

Permendikbud No. 67 Tahun 2013 Tentang Kurikulum MI/SD

Salim, Agus. 2007. *Indonesia Belajarlah !, Membangun Pendidikan Indonesia*. Tiara Wacana. Yogyakarta.

Suharto, Toto. "Pendidikan Kritis Dalam Prespektif Epistemologi Islam". Paper dipresentasikan dalam acara *AICIS 2012 di IAIN Sunan Ampel Surabaya*.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2008. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Sudjana, Nana. 1996. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, Cet. Ketiga*. Sinar Baru Algesindo. Bandung.

Zainuddin. 2008. *Reformasi Pendidikan; Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Draft uji publik kurikulum 2013 tanggal 29 November 2012

Video Talkshow Mata Najwa "Terkungkung kurikulum" tanggal 9 januari 2013

Kompas.com edisi kamis 2 januari 2014. diakses tanggal 4 April 2014.

<http://www.antaranews.com/berita/397722/kemdikbud-akui-kualitas-guru-masih-rendah>, diakses tanggal 12 Januari 2015